**DAFTAR PUSTAKA**

**SUMBER BUKU**

Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia, Rangkang Education, Jakarta, 2012.

A. Mukthie Fadjar dkk, Konstitusionalisme Demokrasi; sebuah diskursus tentang Pemilu Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi, In-Trans Publising, Malang, 2010.

Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta, Kanisius, 2009.

Hendarmin Remadireksa, Dinamika Konstitusi Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2007.

Huda, Ni’matu Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie*,* Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1*,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hukum Acara Pengujian Pengujian Undang-undang, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Rl, Jakarta, 2005.

J. Kaloh, mencari bentuk otonomi daerah, Jakarta: PT Bhinika Cipta, 2007.

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

M. Fadjroel Rachman, “Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme Partisipatif”, dalam M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan Depok: Koekoesan, 2007.

Muthalib & Khan, M.A.A. Theory Og Local Government.New Delhi. 1981.

Nurhasyim, Mch (ed.), Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan

Kepala Daerah. Jakarta-Yogyakarta: Pustaka Pelajar-LIPI, 2005.

Prof Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Ramly Hutabarat Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997), Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metologi Penelitian Hukum dan Junimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990

Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, 2001.

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Sjachran Basah, Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan Cet-3. Bandung: Alumni, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.

Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, 2005.

Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Willy D.S. Voll, Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Wolhoff, G.J., Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas, Jakarta, 1960.

**SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 2Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

**SUMBER LAIN**

http://www.indomedia.com/poskup/2008/02/11/edisi11/utama\_4.htm, diakses tanggal 20 Mei 2009, Jam 10.00 WIB

www.kompasiana.com/2014/09/13/pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-rakyat- atau-pemilihan-kepala-daerah langsung-oleh-dprd-687732.html. 13 September 2014 | 20:48

www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119308-T%2025202...pdf, diakses pada tanggal 09 April 2012 pukul 16.25 WIB.

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran. Monday, 15 September 2014, 12:56 WIB

**JURNAL ILMIAH**

Cecep Effendi, “Evaluasi Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”. Makalah, (tidak diterbitkan, tanpa tahun).

Kauzar, Ahdian DKK. Makalah Demokrasi, Bandung. 2012.

M. Zaki Mubarak, ”Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no 3 (Desember 2007)

Ramlan Surbakti, “Beberapa Pertanyaan tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, dalam Jurnal Pamong Praja, Edisi 3-2005.